



## Moral Disengagement Sebagai Mediator dalam Hubungan antara Moral Identity dan Intention To Corruption pada Mahasiswa

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ricky Ardiansyah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <a href="mailto:rickyhomes1105@gmail.com">rickyhomes1105@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Eben Ezer Nainggolan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <a href="mailto:ebenezer@untag-sby.ac.id">ebenezer@untag-sby.ac.id</a>	
Sayidah Aulia Ul Haque Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya <a href="mailto:sayidahaulia@untag-sby.ac.id">sayidahaulia@untag-sby.ac.id</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Ardiansyah, R., Nainggolan, E. E., & Haque, S. A. U. (2025). Moral Disengagement Sebagai Mediator dalam Hubungan antara Moral Identity dan Intention To Corruption pada Mahasiswa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2078-2085.

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai masih adanya kecenderungan mahasiswa di Surabaya memiliki *intention to corruption*, yang diduga dipengaruhi oleh tingkat *moral identity*, dengan peran *moral disengagement* sebagai mediator. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara *moral identity* dengan *intention to corruption*, serta peran *moral disengagement* sebagai variabel mediator, dengan tujuan menggali proses psikologis yang memungkinkan individu tetap memiliki niat korupsi meskipun memiliki identitas moral tertentu. Penelitian ini melibatkan 350 mahasiswa sebagai partisipan, dengan teknik analisis mediasi menggunakan *PROCESS Macro model 4* oleh Hayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *moral identity* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *intention to corruption* dengan koefisien regresi sebesar 0,203 dan taraf signifikansi  $p < 0,001$ . Uji mediasi menunjukkan bahwa *moral disengagement* mampu memediasi hubungan antara *moral identity* dengan *intention to corruption* secara signifikan, yang menunjukkan bahwa *moral disengagement* memiliki peran penting dalam menjelaskan peningkatan niat korupsi pada mahasiswa meskipun memiliki *moral identity* yang tinggi.

**Kata Kunci:** Moral Disengagement, Korupsi, Mahasiswa

### Abstract

The issue addressed in this study is the continued tendency among university students in Surabaya to exhibit an intention to engage in corrupt behavior, which is suspected to be influenced by the level of moral identity, with moral disengagement acting as a mediating variable. This study aims to examine the relationship between moral identity and intention to corruption, and to explore the mediating role of moral disengagement in order to understand the psychological processes that may lead individuals to justify corrupt intentions despite possessing a strong moral identity. The study involved 350 active university students as participants. Data analysis was conducted using mediation analysis through PROCESS Macro model 4 by Hayes. The results showed that moral identity had a positive and significant relationship with intention to corruption, with a regression coefficient of 0.203 and a significance level of  $p < 0.001$ . The mediation test revealed that moral disengagement significantly mediated the relationship between moral identity and intention to corruption, indicating that moral disengagement plays a crucial role in explaining increased corruption intentions among students, even those with high levels of moral identity.

**Key Words:** Moral Disengagement, Corruption, Students

### A. Pendahuluan

Pendidikan Korupsi merupakan permasalahan klasik yang terus membayangi Indonesia dan dunia, dengan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan terhambatnya pembangunan sosial (Lamijan & Tohari, 2022). Laporan *Transparency International* melalui Indeks Persepsi Korupsi (CPI) menunjukkan bahwa tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya bebas dari korupsi, menjadikannya tantangan global yang membutuhkan strategi efektif dan penegakan hukum yang kuat. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika, karena mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi serta pengkhianatan terhadap kepercayaan public (Williams, 2021). Secara moral, tindakan korupsi merepresentasikan nilai-nilai negatif seperti ketidakjujuran, penyimpangan, dan amoralitas (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011). Lebih jauh, korupsi dapat menjadi perilaku yang dianggap normal dalam lingkungan sosial tertentu, dan sering kali dipengaruhi oleh interaksi antara faktor psikologis, sosial, serta budaya yang permisif terhadap penyimpangan norma (Nainggolan, 2024).

Tabel 1. Ranking dan Skor Negara Korupsi di Dunia

Ranking	Negara	Skor
1	Denmark	90
2	Finland	88
3	Singapore	84
4	New Zealand	83
5	Luxembourg	81
6	Norway	81
.....	.....	.....
99	Ethopia	37
<b>99</b>	<b>Indonesia</b>	<b>37</b>
99	Lesotho	37

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil survei *Transparency International* tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 37 dalam Corruption Perception Index (CPI), naik dari skor 34 pada tahun 2023, dan menempati peringkat 99 dari 180 negara. Kenaikan ini mencerminkan adanya progres positif dalam pemberantasan korupsi, meskipun tantangan dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas masih besar (Putri & Nihayah, 2017). Korupsi tidak lagi terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga telah merambah ke dunia akademik, termasuk di kalangan mahasiswa yang seharusnya menjadi penjaga nilai integritas. Lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran etika akademik turut mendorong maraknya pelanggaran integritas, seperti penyalahgunaan dana organisasi,

manipulasi laporan kegiatan, pemalsuan tanda tangan, hingga kolusi dalam pembagian dana mahasiswa (Suharyo, 2020). Praktik-praktik tersebut tidak hanya mencederai nilai dasar pendidikan tinggi, tetapi juga merusak transparansi dan akuntabilitas dalam sistem organisasi kampus serta melemahkan kepercayaan terhadap kepemimpinan mahasiswa.

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pencapaian akademik, tetapi juga dalam membangun budaya pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan integritas (Rest et al., 1999). Namun, tidak semua mahasiswa menunjukkan komitmen terhadap nilai tersebut, yang berpotensi meningkatkan intensi untuk terlibat dalam praktik koruptif. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, intensi merupakan bentuk kesiapan individu untuk bertindak, dan dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, serta persepsi kendali terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Penelitian oleh Dian dan Rinaldi, (2021) mengungkapkan bahwa ketiga komponen teori tersebut secara signifikan memengaruhi niat korupsi, khususnya pada pengurus organisasi intrakampus, menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk kecenderungan perilaku koruptif di lingkungan akademik.

Niat untuk melakukan korupsi (*intention to corruption*) merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor psikologis, spiritual, dan sosial yang saling memengaruhi. Faktor-faktor seperti religiusitas dan rasa syukur telah terbukti memperkuat integritas moral seseorang serta menjadi pelindung dari perilaku tidak etis (Mumtazah et al., 2020). Dalam konteks mahasiswa, niat korupsi dapat bermula dari praktik kecurangan akademik seperti mencontek, memanipulasi data, atau melanggar kode etik akademik, yang pada dasarnya mencerminkan kecenderungan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak etis. Untuk mencegah munculnya intensi tersebut, *moral identity* memegang peranan penting. *Moral identity* atau identitas moral dipahami sebagai bagian dari konsep diri seseorang yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral yang diyakini dan menjadi dasar internal dalam bertindak secara etis (Aquino & Reed, 2002). Identitas moral terbentuk tidak hanya dari pengetahuan kognitif akan benar dan salah, melainkan juga dari proses internalisasi nilai-nilai tersebut hingga menjadi bagian dari motivasi personal (Mahardika, 2025). Ketika seseorang memiliki *moral identity* yang kuat, ia cenderung menjadikan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai inti dari identitas pribadinya, sehingga perilaku koruptif akan memicu konflik moral internal yang sulit untuk diabaikan (Hardy & Carlo, 2011). Dengan demikian, identitas moral berfungsi sebagai pedoman batiniah yang dapat menekan niat individu, termasuk mahasiswa, untuk terlibat dalam tindakan yang menyimpang secara etis.

Salah satu faktor internal yang berkontribusi terhadap kecenderungan individu dalam melakukan tindakan korupsi adalah *moral disengagement*, yaitu proses kognitif yang memungkinkan seseorang melepaskan keterikatannya terhadap standar moral yang berlaku (Zhao et al, 2019). Konsep ini menggambarkan bagaimana individu mengubah persepsi mereka terhadap tindakan tidak bermoral melalui restrukturisasi kognitif, sehingga perilaku menyimpang dapat dibenarkan secara moral dan tidak menimbulkan rasa bersalah (Bandura, 1999). *Moral disengagement* memungkinkan individu untuk menjaga citra diri yang positif meskipun melakukan pelanggaran etika, karena adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Detert, Treviño, dan Sweitzer (2008) menyatakan bahwa konsep ini merupakan bagian dari teori sosial kognitif Bandura, yang menjelaskan bagaimana proses internal dapat memengaruhi justifikasi terhadap perilaku tidak etis. Dalam konteks korupsi, *moral disengagement* berfungsi sebagai mekanisme rasionalisasi yang memediasi konflik antara dorongan untuk tetap bermoral dan keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak etis.

## B. Metodologi

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen dengan mempertimbangkan peran variabel mediasi. Pendekatan korelasional diterapkan untuk menganalisis arah dan kekuatan hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption*, dengan *moral disengagement* sebagai variabel mediator. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan kausal secara langsung, melainkan untuk memahami bagaimana keterkaitan antarvariabel tersebut muncul dalam konteks psikologis mahasiswa.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2025 dan berlokasi di wilayah Kota Surabaya. Berdasarkan data jumlah mahasiswa aktif di Kota Surabaya pada tahun 2024 yang mencapai sekitar 300.031 mahasiswa, dan dengan menetapkan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 350 partisipan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang berlokasi di Kota Surabaya. Teknik sampling

yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan pendekatan *convenience sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden pada saat penelitian dilakukan.

Selain itu, penelitian ini menerapkan model mediasi sebagai kerangka analisis untuk memahami peran *moral disengagement* sebagai mediator psikologis yang menjembatani hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption*. Dalam hal ini, *moral disengagement* diposisikan sebagai mekanisme kognitif yang dapat melemahkan pengaruh sikap antikorupsi terhadap perilaku yang sesuai secara etis. Untuk menguji hipotesis mediasi tersebut, digunakan teknik analisis statistik inferensial berupa analisis jalur (*path analysis*) berbasis pendekatan regresi. Proses pengujian mediasi dilakukan mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Hayes (2018) dengan bantuan perangkat lunak SPSS yang dilengkapi dengan *macro PROCESS*, guna memperoleh estimasi yang tepat atas efek langsung maupun tidak langsung antarvariabel.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil

Tabel 2. Hasil Uji *Process Macro Model 4* oleh Hayes

Jalur	Koefisien	SE	t	p	95% Confidence Interval (CI)		Keterangan
					LLCI	ULCI	
Patch C							
<i>Total Effect</i> (TX → TY)	0,203	0,035	5,812	<0,001	0,134	0,276	Signifikan
<i>Direct Effect</i> (TX → TY) Kontrol TZ	-0,003	0,021	-0,155	0,876	-0,046	0,039	Tidak Signifikan
(a x b)							
<i>Indirect Effect</i> TX → TZ → TY	0,207	0,031	-	-	0,148	0,270	Signifikan
Path A							
TX → TZ	0,417	0,057	7,223	<0,001	0,030	0,531	Signifikan
Path B							
TZ → TY	0,496	0,019	24,88	<0,001	0,456	0,535	Signifikan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *PROCESS Macro model 4* oleh Hayes, ditemukan bahwa *moral identity* memiliki hubungan langsung (*total effect*) yang positif dan signifikan terhadap *intention to corruption*. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,2036 dengan tingkat signifikansi  $p < 0,001$  ( $p < 0,05$ ), serta *confidence interval* (CI) 95% sebesar [0,1347 – 0,2726] yang tidak mencakup angka nol. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption* signifikan secara statistik. Nilai koefisien (b) sebesar 0,2036 mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor *moral identity* seseorang, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu tersebut memiliki niat untuk melakukan korupsi (*intention to corruption*). Meskipun hal ini tampak berlawanan dengan ekspektasi teoritis, hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keberadaan mediator dalam model. Besarnya nilai koefisien b mencerminkan adanya pengaruh positif antara kedua variabel, di mana semakin besar nilai *moral identity*, semakin tinggi pula *intention to corruption* sebelum dikontrol oleh mediator.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data menggunakan pendekatan mediasi sederhana (Model 4) dalam *PROCESS Macro* oleh Hayes, ditemukan bahwa *moral disengagement* memediasi

hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption* secara signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dari *moral identity* terhadap *intention to corruption* melalui *moral disengagement* adalah signifikan secara statistik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien *indirect effect* sebesar  $b = 0,2070$ , dengan *bootstrapped standard error* sebesar 0,0312 dan interval kepercayaan 95% (BootLLCI = 0,1482; BootULCI = 0,2705). Karena batas bawah dan batas atas dari interval kepercayaan ini tidak mencakup angka nol, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut benar-benar terjadi dan signifikan secara statistik.

Sementara itu, ketika *moral disengagement* dimasukkan ke dalam model sebagai variabel mediator, pengaruh langsung *moral identity* terhadap *intention to corruption* menjadi tidak signifikan, dengan nilai koefisien  $b = -0,0034$ ,  $p = 0,8764$  dan *confidence interval* 95% berada pada rentang  $-0,0464$  hingga  $0,0396$ . Hal ini menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan keberadaan *moral disengagement* sebagai mediator, hubungan langsung antara *moral identity* dan *intention to corruption* tidak lagi bermakna secara statistik. Sebaliknya, sebelum mediator dimasukkan, pengaruh total antara *moral identity* terhadap *intention to corruption* bersifat signifikan, dengan nilai koefisien  $b = 0,2036$ ,  $p < 0,001$  dan *confidence interval* 95%  $[0,1347 - 0,2726]$ . Kombinasi hasil ini mengindikasikan terjadinya mediasi penuh (*full mediation*), di mana *moral identity* tidak lagi berpengaruh langsung terhadap *intention to corruption* ketika *moral disengagement* diperhitungkan dalam model.

## 2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption* dengan *moral disengagement* sebagai variabel mediator. Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan partisipan sebanyak 350 mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Surabaya. Pembahasan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu apakah terdapat hubungan negatif antara *moral identity* dan *intention to corruption*, serta apakah *moral disengagement* memiliki peran sebagai variabel mediator dalam hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai sejauh mana *moral identity* berkontribusi dalam membentuk atau menurunkan niat individu untuk melakukan tindakan korupsi, serta untuk mengetahui apakah *moral disengagement* berfungsi sebagai jalur psikologis yang menjembatani pengaruh tersebut.

Secara konseptual, *moral identity* merupakan bagian dari struktur diri individu yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang terinternalisasi, dan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis. Aquino dan Reed (2002) menjelaskan bahwa *moral identity* berperan sebagai motivator internal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang mereka anggap penting. Dengan kata lain, individu yang memiliki *moral identity* tinggi cenderung menempatkan prinsip moral sebagai bagian inti dari identitas dirinya, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, secara teoritis, seseorang dengan *moral identity* yang tinggi seharusnya memiliki kecenderungan yang rendah untuk menunjukkan niat atau perilaku yang tidak etis, termasuk niat untuk melakukan tindakan korupsi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang tidak sejalan dengan asumsi teoritis tersebut. Pada konteks penelitian ini, mahasiswa dengan tingkat *moral identity* yang tinggi justru tetap menunjukkan niat untuk melakukan tindakan korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan *moral identity* yang tinggi tidak secara otomatis menurunkan kecenderungan individu untuk memiliki niat melakukan korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang berbeda dari asumsi teoritis tersebut. Pada konteks penelitian ini, individu yang memiliki *moral identity* yang tinggi justru tetap menunjukkan niat untuk melakukan tindakan korupsi. Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *moral licensing* yang dikemukakan oleh Merrit, Effron, Monin (2010). *Moral licensing* menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa telah melakukan tindakan moral atau memiliki citra moral yang positif, mereka dapat merasa memiliki kelonggaran untuk melakukan penyimpangan etis di lain waktu tanpa merasakan ancaman terhadap citra moral dirinya. Individu merasa telah "menabung" moralitas, sehingga ketika mereka melakukan tindakan yang menyimpang, mereka tidak merasa melanggar identitas moral mereka. Konsep ini berkaitan erat dengan gagasan *moral credentials* yang juga dikemukakan oleh Effron (2015) *Moral credentials* mengacu pada keyakinan seseorang bahwa reputasi moral atau tindakan baik yang pernah dilakukan di masa lalu dapat dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran untuk melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan norma etika di masa sekarang. Konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang yang

bermoral bisa melakukan tindakan tidak etis karena mereka merasa telah "cukup bermoral" di mata dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, *moral credentials* dapat melemahkan fungsi kontrol moral internal dan secara tidak langsung mendorong munculnya niat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika.

Selain itu, penjelasan mengenai intensi untuk berperilaku koruptif juga dapat dikaitkan dengan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991). Pada model ini, niat (*intention*) dianggap sebagai prediktor utama dari suatu perilaku, yang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Ajzen juga menekankan bahwa dalam konteks perilaku moral, atau nilai moral dapat menjadi prediktor tambahan yang memperkuat intensi seseorang. Namun, dalam kenyataannya, niat seseorang tidak hanya dibentuk oleh nilai moral yang dianut, tetapi juga oleh bagaimana nilai-nilai tersebut diproses secara kognitif dan situasional. Maka dari itu, meskipun seseorang memiliki identitas moral yang tinggi, individu akan tetap berpotensi memiliki niat untuk melakukan perilaku tidak etis apabila terdapat faktor-faktor psikologis lain yang mengintervensi, seperti *moral disengagement*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *moral disengagement* memediasi hubungan antara *moral identity* dan *intention to corruption*. Temuan ini sejalan dengan pandangan Bandura (1999), tokoh utama dalam teori *moral disengagement*, yang menyatakan bahwa individu dapat melakukan mekanisme kognitif untuk menonaktifkan moral internalnya secara sementara. Bandura menguraikan delapan mekanisme *moral disengagement* yang memungkinkan seseorang untuk merasionalisasi tindakan tidak etis, seperti justifikasi moral, eufemisme, perbandingan merugikan, dan pemindahan tanggung jawab. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki identitas moral tinggi pun dapat tetap mempertimbangkan tindakan korupsi, jika individu mampu melakukan rasionalisasi secara kognitif untuk menghindari konflik moral internal. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Detert, Treviño, dan Sweitzer (2008) yang menyatakan bahwa *moral disengagement* dapat menjadi mediator penting dalam hubungan antara nilai moral internal dengan perilaku tidak etis. Mereka menegaskan bahwa individu tidak selalu bertindak sesuai dengan nilai moral yang mereka percayai, khususnya ketika mereka mampu menciptakan justifikasi internal yang meyakinkan. Pada konteks ini, penting untuk dipahami bahwa *moral identity* tidak selalu mampu sepenuhnya mencegah munculnya niat untuk melakukan tindakan korupsi, karena pengaruh positifnya dapat dilemahkan ketika seseorang mulai menggunakan mekanisme *moral disengagement*.

Uji perbedaan rata-rata antara nilai teoritis dan nilai empiris pada variabel *intention to corruption* menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Rata-rata teoritis disusun berdasarkan asumsi bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari komunitas akademik yang menjunjung nilai-nilai moral dan etika, seharusnya memiliki intensi yang rendah terhadap tindakan korupsi. Akan tetapi, hasil pengukuran empiris menunjukkan bahwa rata-rata skor *intention to corruption* berada di atas nilai acuan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan nyata di kalangan mahasiswa untuk memiliki niat melakukan tindakan yang tergolong tidak etis secara moral dan hukum. Tingginya skor *intention to corruption* tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan moral dengan komitmen afektif dan perilaku etis yang seharusnya menyertai. Mahasiswa yang memahami bahwa korupsi adalah tindakan tidak etis belum tentu memiliki kecenderungan untuk menolaknya secara konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya internalisasi nilai antikorupsi, tekanan lingkungan, serta budaya akademik yang permisif terhadap pelanggaran kecil. Lingkungan akademik sebagai ruang yang secara konsisten menanamkan dan menegakkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Dosen dan tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi teladan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami pentingnya integritas secara teoritis, tetapi juga terdorong untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata.

Pengujian terhadap variabel *moral disengagement* menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara rata-rata teoritis dan empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Hasil teoritis disusun berdasarkan asumsi bahwa individu, khususnya mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda, idealnya memiliki kecenderungan rendah terhadap mekanisme pelepasan tanggung jawab moral. Akan tetapi, hasil pengukuran empiris menunjukkan bahwa skor rata-rata *moral disengagement* mahasiswa justru lebih tinggi. Perbedaan yang signifikan secara statistik ini mengindikasikan bahwa mahasiswa dalam penelitian ini cenderung menggunakan mekanisme kognitif untuk membenarkan atau merasionalisasi tindakan tidak etis dari standar moral. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat *moral disengagement* di kalangan mahasiswa tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian dalam konteks pengembangan karakter dan etika

akademik. Oleh karena itu, meskipun mahasiswa memiliki pengetahuan tentang benar dan salah, proses pembenaran yang dilakukan secara kognitif memungkinkan mereka untuk melanggar norma tanpa mengalami konflik moral. Dalam konteks akademik, hal ini bisa tercermin melalui perilaku seperti mencontek, tidak jujur dalam tugas, atau melakukan plagiarisme, yang dianggap sebagai tindakan kecil namun secara moral tidak etis. Temuan ini mempertegas pentingnya budaya akademik yang konsisten menegakkan prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi harus dibangun melalui peran aktif seluruh elemen kampus.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *moral identity* dengan *intention to corruption*, dan peran *moral disengagement* sebagai mediator dalam hubungan kedua variabel tersebut. Pengujian hipotesis dilakukan terhadap 350 mahasiswa aktif dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan analisis mediasi, diperoleh kesimpulan bahwa *moral identity* memiliki hubungan yang signifikan terhadap *intention to corruption*. Hasil ini menunjukkan bahwa identitas moral tidak hanya memengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan tindakan korupsi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui mekanisme mediasi yang dijelaskan oleh *moral disengagement*. Artinya, mahasiswa yang memiliki *moral identity* tinggi tidak serta-merta terbebas dari kecenderungan untuk berniat melakukan tindakan koruptif, terutama apabila mereka menggunakan mekanisme pelepasan tanggung jawab moral untuk membenarkan tindakan tidak etis. Dengan kata lain, *moral disengagement* memungkinkan mahasiswa menonaktifkan kontrol moralnya, sehingga intensi terhadap perilaku korupsi tetap dapat muncul meskipun memiliki identitas moral yang tinggi.

#### E. Referensi

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES*, 50, 179–211.
- Aled, W. (2021). Corruption definitions and their implications for targeting natural resource corruption defined, including in NRM. *Targeting Natural Resource Corruption*, 1–6.
- Aquino, K., & Reed, A. (2002). The Self-Importance of Moral Identity. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(6), 1423–1440. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423>
- Bandura, A. (1999). Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209. <https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303>
- Detert, J. R., Trevino, L. K., & Sweitzer, V. L. (2008). Moral Disengagement in Ethical Decision Making: A Study of Antecedents and Outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 93(2), 374–391. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.2.374>
- Dian, N. E. Z., & Rinaldi. (2021). Pengaruh Teori Perilaku Terencana Terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi)*, 11(2), 150–167. <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>
- Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011). Moral Identity : What Is It, How Does It Develop, and Is It Linked to Moral Action? *Child Development Perspectives*, 5(3), 212–218. <https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2011.00189.x>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction To Mediation, Moderation and Conditional Process Analysis (A Regression-Based Approach)* (D. A. Kenny & T. D. Little (eds.); 2nd ed.). The Guilford Press.
- Kementerian, P. dan K. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (N. T. Puspito, M. E. S, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (eds.); 1st ed.). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. In *JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPcH* (Vol. 3, Issue 02).
- Mahardika, T. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Merritt, A. C., Effron, D. A., & Monin, B. (2010). Moral Self-Licensing: When Being Good Frees Us to Be Bad. *Journal Compilation*, 5, 344–357.
- Mumtazah, H., Rahman, A. A., & Sarbini. (2020). Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 101–113. <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.1122>

- Nainggolan, E. E. (2024). Perilaku korupsi : Tinjauan psikologi, sosial, politik dan budaya. *INNER: Journal of Psychological Research*, 4(1), 45–51. <https://aksiologi.org/index.php/inner>
- Putri, D. A., & Nihayah, Z. (2017). The Effect Of Moral Integrity, Lifestyle And Organizational Culture On Anti-Corruption Intention. *TAZKIYA Journal of Psychology*, 5(2), 289–300.
- Rest, J. R., Narvaez, D., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (1999). A Neo-Kohlbergian Approach to Morality Research. *Journal OfMoral Education*, 29(4), 382–385. <https://doi.org/10.1080/03057240020015001>
- Suharyo. (2020). *Peranan Mahkamah Agung Sebagai Benteng Terakhir Dalam Penegakan Hukum Pada Pemberatasan Pidana Korupsi*. Balitbangkumham. <https://perpustakaan.jakarta.go.id/book/detail?cn=INLIS000000000862726>
- Zhao, H., Zhang, H., & Xu, Y. (2017). Effects of Perceived Descriptive Norms on Corrupt Intention : The Mediating Role of Moral Disengagement. *International Journal of Psychology*, 1–9. <https://doi.org/10.1002/ijop.12401>